

**HAK CIPTA DAN PEDHALANG  
(STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTAAN  
LAKON WAYANG WONG DI SURAKARTA).**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh :**

**ADITYO PUTRA PRATAMA**  
**NIM. C100080025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini disetujui oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

Pembimbing II



**Inayah, S.H., M.H.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : ADITYO PUTRA PRATAMA  
NIM : C100080025  
Fakultas/Jurusan : Hukum  
Jenis : Skripsi  
Judul : HAK CIPTA DAN PEDHALANG (STUDI TENTANG  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTAAN  
LAKON WAYANG WONG DI SURAKARTA).

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 Desember 2014  
Yang Menyatakan



(ADITYO PUTRA PRATAMA)

## ABSTRAKSI

ADITYO PUTRA PRATAMA, C100080025, 2014. **HAK CIPTA DAN PEDHALANG (STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTAAN LAKON WAYANG DI SURAKARTA)**. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hak Cipta antara dalang dengan lakon, kemudian saya korelasikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dapat saya simpulkan bahwa dalang terhindar dari bentuk pelanggaran karena masa berlakunya yang telah selesai, hal ini yang menjadikan dalang tidak bermasalah untuk menggubah. Dalam seni pedalangan, dalang yang melakukan peniruan lakon yang mirip seperti buku pakem ini digolongkan sebagai dalang Wikalpa. Sebutan dalang ini yakni Sebutan bagi dalang yang tidak memiliki kreasi, hanya mendalang mirip persis seperti buku pakem lakon atau lakon milik dalang lain, tanpa improvisasi sama sekali atau tidak memiliki kreativitas. Kaitannya dengan hukum, peniruan tersebut dapat saja digolongkan sebagai bentuk pelanggaran jika saja Ciptaan yang ditiru tersebut diketahui Penciptanya. Namun pada Ciptaan diatas termasuk dalam kategori menggubah, selain sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Ekspresi Tradisional Budaya yang tidak diketahui Penciptanya yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak melakukan Pengumuman, masa berlaku 50 tahun yang memang sudah habis masanya maka dalang berhak dan dapat mentransformasikan dengan kreativitas yang baru terhadap Ciptaan tersebut sebagai Hak Ciptanya. Sehingga Ciptaan dari dalang yang menggubahnya termasuk ke dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf e, n, dan o Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Lakon Carangan Wayang, Dalang*

## ABSTRACT

Adityo Putra Pratama , C100080025 , 2014. **COPYRIGHT AND PEDHALANG (STUDY ON THE LEGAL PROTECTION OF CREATION IN THE PUPPET AT SURAKARTA)**. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. Copyright among mastermind with drama, then I have correlated with Act No. 28 of 2014 on Copyright, then I can conclude that the mastermind avoid infringement since the time of the form that has been completed, it is that makes mastermind is not problematic to compose. In the art of puppetry, puppeteer who plays imitation-like grip the book is classified as a puppeteer Wikalpa. The term is the term for the mastermind mastermind who do not have the creation, just like a puppet plays exactly like a book or a play -owned grip another puppeteer, without improvisation at all or do not have the creativity. Relation to the law, the impersonation can be classified as a violation if any work which is imitated tersebut known Creator. But the above are included in the category creation composing, other than in accordance with the provisions of article 38 of Law No. 28 of 2014 on Traditional Cultural Expressions which is unknown who explained that everyone is entitled to perform announcement, the validity period of 50 years which is already expired, the mastermind eligible and can transform with new creativity to such work as copyright. So the creation of a manipulator which it is composed are included in the provisions of Article 40 paragraph ( 1 ) letter e , n , and o Law of Copyright.

Keywords : Copyright, Carangan Playing Movies, Puppeteer

## **PENDAHULUAN**

Seni secara umum, memiliki beberapa arti. Seni berarti (1) keahlian membuat karya yang bermutu, (2) karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, seperti tari, lukisan dan ukiran. Seni juga berarti (1) kesanggupan akal akal untuk mencitakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa), (2) orang yang berkesanggupan luar biasa, genius.

Tradisi adalah (1) adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, (2) penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Berdasarkan dua makna tersebut (seni dan tradisi) dapat dinyatakan bahwa seni tradisi adalah sesuatu yang diciptakan luar biasa, yang mengikuti adat istiadat dari nenek moyang atau penciptaannya dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Seni tradisi ada yang berupa seni suara dan seni pertunjukan.

Pertunjukan adalah (1) sesuatu yang dipertunjukkan, tontonan (bioskop, wayang dan lain-lain), (2) pameran (barang-barang). Seni pertunjukkan adalah karya yang luar biasa yang dilakukan secara keaktoran oleh seniman yang dipertunjukkan kepada penonton. Jenis-jenis seni yang dipertunjukkan misalnya tari, wayang, topeng, kethoprak, jaipong, ludruk, reog dan lain-lain.

Wayang wong adalah seni tradisi Jawa. Wayang wong adalah suatu pertunjukan yang mengandung komponen cerita, dalang, atau sutradara dan pelaku-pelaku wayang yang berupa manusia. Jika dalam wayang purwa actor-aktrisnya berupa boneka, dalam wayang wong pelaku-pelaku itu berupa manusia. Ada manusia yang memerankan diri sebagai Puntadewa, Kumbakarno, Janaka, Abimanyu, Werkudara, dan lain-lain.

Lakon berasal dari kata laku yang berarti sesuatu yang sedang berjalan atau suatu peristiwa, atau gambaran sifat manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lakon merupakan gambaran tentang sifat dan karakter manusia di dunia. Dalam wayang wong, lakon adalah cerita yang dibawakan dalang dalam pertunjukan wayang wong. Menurut Claire Holt lakon adalah deretan yang diorganisasi dari adegan-adegan yang berkesinambungan dalam sebuah pertunjukkan.

Sumber lakon yang biasa dibawakan wayang wong pada dasarnya bersumber dari Mahabarata dan Ramayana. Lakon sering dibawakan pada umumnya berupa fragmen atau cuplikan, petikan atau bagian dari suatu cerita. Bondhan Harghana dan Muh. Pamungkas Prasetyo Bayu menyatakan ada dua jenis lakon, yaitu lakon pokok dan lakon carangan. Lakon pokok, yang sering juga disebut lakon pakem merupakan cerita yang diambil langsung dari kebiasaan resmi dan diakui. Sedangkan lakon carangan merupakan cerita yang dikarang atau dibuat-buat hanya untuk menambah perbendaharaan cerita pedalangan.<sup>1</sup>

Jumlah repertoar lakon wayang sekarang ini sulit diketahui dengan pasti. Selain lakon-lakon baku yang sudah juga ditambah lagi dengan munculnya lakon-lakon baru yang disebut lakon carangan.<sup>2</sup> Berdasarkan laporan penelitian lakon karangan itu terdapat 116 judul lakon yang telah dikumpulkan dari 116 judul lakon itu, sebanyak 21 judul adalah lakon wahyu yaitu : wahyu darma, dewandaru, golek kencana, jatmika, jayaningrat, legundhi wulung, linggamaya, makutha kencana, pancadarma, wahyu pandhu dados ratu, panunggal jati, sabuk dendam, pamungkas, saptamaya, sasangka mulya, sihnugraha, terate mas, tohjali, tohjali abadi, triangga, dan witing swarga wohing

---

<sup>1</sup> Markamah, 2006, *Pengembangan Model Revitalisasi Seni Pertunjukan Wayang Wong*, Surakarta : Muhammadiyah University Press. Hal. 32

<sup>2</sup> Waridi, 2004, *Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang*, Surakarta : Etnika. Hal. 56

mardika. Sebagian lakon-lakon wayang beredar sampai saat ini adalah merupakan warisan budaya dari zaman terdahulu.<sup>3</sup>

Bertambahnya lakon carangan ini diketahui berdasarkan lakon carangan yang dikumpulkan pada tahun 1983-1984 terhadap dalang-dalang se eks karesidenan Surakarta yang laris pada decade 60-70 an. Dari wawancara yang dilakukan diperoleh keterangan bahwa hampir semua dalang mengaku pernah menyusun, mengubah dan atau mencipta lakon.

Kemampuan “mencipta” inilah dalam olah seni, kreativitas, orisinalitas dan otentisitas ide seorang seniman menjadi bagian krusial, apalagi kini sering terjadi pengklaiman dan peniruan karya seni hasil kreativitas seniman oleh seniman lainnya. Pengklaiman banyak terjadi dalam komunitas dalang, seperti peniruan sanggit, materi dagelan, sulukan dan sebagainya.<sup>4</sup> Mulai dari karya sanggit atau karangan lakon wayang itu sendiri, hingga kreasi tatah sungging.<sup>5</sup>

Apabila sudah terjadi demikian memang baru terasa betapa pentingnya hukum dalam kaitannya dengan peran Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Hak Cipta yang bersumber dari Hak Milik Intelektual. Pengertian Hak Milik Intelektual adalah “pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya Intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis”.<sup>6</sup>

Wayang merupakan salah satu hasil kreatifitas manusia di bidang karya seni, Wayang merupakan salah satu karya pertunjukan yang dilindungi oleh Undang – undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat di dalam Pasal 40 dan Pasal

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> M Jazuli, 2003, *Dalam Negara Masyarakat Sosiologi Pedalangan*, Semarang : LIMPAD.

<sup>5</sup> Soloblitz.co.id, Senin, 17 Februari 2014 pukul 17.00 dalam

<http://www.soloblitz.co.id/2013/02/05/wayang-kreasi-ki-bambang-suwarno-banyak-ditiru-para-dalang/>

<sup>6</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta : Gramedia, hal 45.

38 ayat (1). Pasal 40 ayat (1) memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk karya seni wayang disebutkan di dalam huruf (e). Sedangkan Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap lakon carangan. Kedua, Mengetahui Upaya hukum seperti apa yang dilakukan oleh dalang untuk melindungi karyanya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan

---

<sup>7</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Universitas Airlangga, Hal. 1 dan 3



dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta penciptaan lakon carangan wayang wong di eks karesidenan Surakarta**

Pada Zaman dulu, regenerasi dalang sudah berjalan secara alami. Dalam arti, secara tidak langsung, anak dalang yang lahir dan dibesarkan di lingkup pedalangan berpotensi untuk menjadi dalang. Hal ini, Diawali dari sekedar meniru-niru tindakan yang dilakukan dalang senior, seperti melagukan *suluk*, menggerakkan wayang atau *sabet*, dan mengucapkan beberapa dialog atau *janturan/pocapan*. kemudian setelah dianggap pantas, anak dalang tersebut diberi kesempatan untuk pentas *mucuki* (*mayang* sebelum orang tuanya, atau dalang lain, menyajikan *pakeliran* yang utama). setelah dianggap layak, anak dalang diberi kesempatan untuk mendalang di waktu siang, lengkap satu lakon, meski repertoar masih terbatas hingga mendapat pujian, dorongan motivasi, dan juga tidak jarang mendapat umpatan dan cemoohan orang tuanya jika melakukan kesalahan.

Oleh karena hal tersebut, *pakeliran* yang dilakukan seorang anak dalang tidak mungkin menyimpang dari *pakeliran* yang dilakukan oleh orang tuanya. Mulai dari hal yang paling kecil sampai yang bersifat mendasar, dan juga dari cara berbusana, warna suara, teknik serta cara pergelaran wayang atau *pakeliran* (*suluk*, *sabet*, *antawacana*, *janturan*, *pocapan*, perbendaharaan *gendhing* dan *keprakan/dhodhogan*) sampai bentuk humor, garapan alur cerita, wacana yang dikembangkan, dan sebagainya. Hal meniru tersebut sudah menjadi tradisi dan menjadi warisan dari nenek moyang, dalang meniru ayah ataupun leluhurnya.

Pada perkembangannya di zaman teknologi sekarang, seorang dalang lebih mudah untuk mengambil dan dipelajari sebagai bekal mendalang. Namun, adanya dalang yang kurang kreativitas menyebabkan muncul pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkup pedalangan. Pelanggaran yang dimaksud seperti banyak terjadi hal-hal yang dalam menampilkan lakon carangan milik orang lain tanpa izin dan tanpa ada honor izin kepada penciptanya, dan adanya penjiplakan terhadap karya. Dalam seni tradisi, seorang dalang yang menjiplak sebagian atau mirp 100% tidak masalah, dan sudah berlaku umum di lingkup pedalangan. Namun, berbeda jika karya tersebut dalam bentuk penulisan ilmiah hal semacam itu bisa menjadi bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ki Purbo Asmoro dan Ki Bambang Suwarno yang pernah mengalami bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap karya ciptanya, yakni dari Ki Purbo Asmoro, Beliau pernah mendalang pada suatu acara di Jakarta. Pada saat pementasan, pakelirannya direkam oleh seseorang. Kemudian hasil rekaman yang diperoleh, dijual oleh orang tersebut. Parahnya tindakan yang dilakukan oleh si perekam tidak diketahui oleh dalang yang pentas.<sup>8</sup> Sedangkan dari Ki Bambang Suwarno, Beliau mengatakan bahwa pernah ada dalang yang waktu itu sedang pentas di Jakarta. Wayang yang dipentaskan memiliki ciri khas wayang yang berlubang-lubang dan diakui dalang itu sebagai karya ciptanya. Namun pada kenyataannya, wayang dengan karakter berlubang-lubang tersebut merupakan ciri khas hasil karya dari Ki Bambang Suwarno dan dijiplak mirip oleh dalang yang tidak bertanggung jawab. wayang berlubang-lubang itu merupakan ciri khas karya Ki Bambang Suwarno.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Suwarno, dalang dan dosen ISI Surakarta.

Dalam Dunia Pedalangan, Berkembangnya perbuatan seperti membajak, meniru, dan mengakui sebagai hasil ciptaan orang lain sebagai ciptaan sendiri, baik sebagian maupun sepenuhnya mirip 100% dengan karya pencipta, hal semacam itu sudah biasa dan berlaku umum di kalangan profesi dalang tersebut di lingkup pedalangan. Perbuatan demikian amat merugikan bagi masa depan perkembangan kreativitas dan kepentingan para pencipta yang telah berusaha dengan susah payah guna tercipta suatu penemuan baru untuk kemaslahatan umat manusia, khususnya bagi para pedalang. Perkembangan ini menyebabkan sektor kehidupan seperti ekonomi dalang terganggu dan juga kreativitas akan berkarya menjadi menipis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ki Purbo Asmoro, bahwa Upaya Hukum yang dilakukan saat ini hanya berlaku perlindungan terhadap naskah lakon dalam bentuk penulisan ilmiah di tingkat akademisi. berbeda dengan di tingkat pementasan, tidak ada upaya hukum yang dilakukan dan tidak ada tuntutan menuntut antar dalang. Hal ini disebabkan karena adanya faktor seni tradisi dan juga kekerabatan antar rekan satu profesi di lingkungan pedalangan.

### **Perlindungan hukum terhadap hak cipta penciptaan lakon wayang wong di eks karesidenan Surakarta**

Berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara dengan informan bahwa dalam seni pedhalangan, belum ada dalang yang berpikir memberikan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karyanya. Hal ini dikarenakan dalang belum berpikiran untuk mendaftarkan hasil lakon karya ciptanya dan juga masih terpaku pada kebiasaan di dalam seni tradisi, seperti jika adanya pemakaian lakon carangan wayang yang menjadi

hasil gubahan maupun meniru karya dalang yang lain itu sudah menjadi fenomena biasa di lingkup pedalangan.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta memang tidak memberikan suatu keharusan mengenai pendaftaran ciptaan terhadap karya cipta yang telah dihasilkan. pendaftaran hak tersebut bukan merupakan keharusan melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa karena seseorang yang tidak mendaftarkan hasil ciptaannya tetap mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptanya. Dalam Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta merupakan sebagai alat bukti yang otentik apabila terjadi sengketa dalam hal kepemilikan Hak Cipta.

Sebagaimana ketentuan pasal 66-73 Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur tentang bagaimana tata cara proses pencatatan Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun faktor yang menyebabkan dalang belum bertindak untuk melindungi karya ciptanya yakni biaya pendaftarannya mahal, waktu pengurusannya lama dan proses yang berbelit-belit. Namun bagaimanapun kendala faktor semacam itu, ketentuan pendaftaran juga sangatlah penting kaitannya terhadap Hak Cipta lakon carangan atau karangan di lingkup pedhalangan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian jika sewaktu-waktu dipersengketakan oleh pihak yang dirugikan dan memberikan perlindungan kepada lakon Ciptaannya.

Selain Pendaftaran, Upaya hukum yang bisa dilakukan yakni pertama, Pencipta/pemegang Hak Cipta dapat mengadukan dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta ke Pengadilan sebagaimana dalam ketentuan pasal 96 ayat 1 bahwa *“Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh*

---

<sup>10</sup> Purbo Asmoro, Dalang, Wawancara Pribadi, Surakarta, 10 Agustus 2014, pukul 10.00 WIB.

*Ganti Rugi*”, pasal 96 ayat 2 bahwa “*Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait*”, dan pasal 96 ayat 3 bahwa “*Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”. Kedua, penyelesaian kasus pelanggaran Hak Cipta melalui arbitrase, sebagaimana pada pasal 95 ayat (1) bahwa “*Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan*”. penyelesaian semacam ini dirasa justru urusannya akan lebih sederhana serta biayanya tidak begitu besar. Namun adapun akibat hukum jika permasalahan ini diselesaikan dengan musyawarah.

Berkaitan dengan akibat hukum, Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tentunya selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat yang di tentukan Undang-Undang sudah pasti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun upaya-upaya hukumnya antara lain:

*Pertama*, Upaya hukum preventif adalah usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik hak cipta dan pemerintah harus melakukan upaya preventif sebagai pencegahan pelanggaran. Adapun usaha pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mendaftarkan karya cipta dan pemahaman pencipta terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain : meningkatkan pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu pemahaman

bersama antara para penegak hukum tentang pentingnya hak cipta. sayangnya kedua upaya tersebut belum terealisasi kenyataan dilapangan karena belum ada tindakan yang dilakukan baik dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pemerintah dan Aparat Hukum dalam hal upaya pencegahan, penyuluhan serta pembinaan.

*Kedua*, Upaya Hukum Represif adalah suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya hukum represif ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian dari segi upaya pidana, Dalam hal ketentuan pidana diatur dalam pasal 96 ayat 2 bahwa *“Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait”*, Upaya hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata dikarenakan dalam upaya hukum perdata lebih menitik beratkan kepada proses ganti ruginya saja. Berbeda dengan upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran. Namun sayangnya kedua upaya tersebut yakni upaya perdata dan pidana juga belum dimanfaatkan oleh Pencipta terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkup pedhalangan.

Dari ulasan diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan pencipta membiarkan saja apabila sewaktu-waktu terjadi pelanggaran terhadap karyanya dan mereka lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun lantaran karena biayanya dinilai lebih murah dari pada harus membawanya ke pengadilan yang tentunya harus mengeluarkan

biaya yang lebih mahal dan atas dasar tradisi, sesama rekan-rekan dalang tidak begitu mempermasalahkan jika hal semacam itu terjadi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta penciptaan lakon wayang wong di eks karesidenan Surakarta. Dari seluruh hasil karya yang diteliti : Dalang Bambang Suwarno, terdapat 7 karya yang memenuhi kriteria sebagai karya penciptaan, dan 3 karya yang tidak memenuhi kriteria sebagai karya penciptaan Dalang Purbo Asmoro, terdapat 3 karya yang memenuhi kriteria sebagai karya penciptaan, dan tidak ada karya yang tidak memenuhi kriteria sebagai karya penciptaan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Ciptaan

Dari karya-karya yang memenuhi kriteria sebagai Hak Cipta : Terdapat pengubahan 13 karya, yakni 10 karya diantaranya milik dalang Bambang Suwarno, dan 3 karya sisanya milik dalang Purbo Asmoro. Hal ini sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Ekspresi Tradisional Budaya yang tidak diketahui Penciptanya dan pasal 40 ayat (1) huruf e, n, dan o tentang Ciptaan yang dilindungi. Terdapat 1 karya, dalam bentuk pelanggaran Hak Moral, Hak Ekonomi dan Ciptaan yang dilindungi. 1 karya tokoh wayang yang ada di dalam lakon milik dalang Bambang Suwarno. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Moral, pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Ekonomi, dan pasal 40 ayat 1 huruf e dan f tentang Ciptaan yang dilindungi.

## **Saran**

*Pertama*, Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat seniman khususnya di lingkup pedalangan untuk memahami Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Lakon Carangan atau Karangan di Eks Karesidenan Surakarta melalui pelaksanaan seminar dan forum sosialisasi secara terus menerus.

*Kedua*, Perlunya kesadaran dari seniman untuk berusaha menciptakan karya-karya baru hasil kreativitasnya sendiri, sehingga penambahan repertoar lakon carangan diharapkan bertambah dengan adanya lakon-lakon baru yang masih fresh. Dan juga diharapkan adanya rasa saling menghargai antar seniman terhadap karyanya.

*Ketiga*, Perlunya prosedur yang dilakukan oleh seniman untuk meminta dan mendapat izin dari Pencipta jika ingin mengubah lakon carangan milik dalang lain atau pujangga.

*Keempat*, Jika melakukan gubahan, Dalang harus memberi kreativitas baru yang membedakan dan mengganti judul dengan judul yang baru, agar tidak sama dan merusak lakon yang sudah ada.



## DAFTAR PUSTAKA

Jazuli, M, 2003, *Dalam Negara Masyarakat Sosiologi Pedalangan*, Semarang: LIMPAD.

Markamah, 2006, *Pengembangan Model Revitalisasi Seni Pertunjukan Wayang Wong*, Surakarta : Muhammadiyah University Press. Hal. 32

Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia.

Waridi, 2004, *Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang*, Surakarta: Etnika.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga.

### WEBSITE :

<http://www.soloblitz.co.id/2013/02/05/wayang-kreasi-ki-bambang-suwarno-banyak-ditiru-para-dalang/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 17.00